



## Implementasi Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat

Angelina Lale Buu<sup>1\*</sup>, Yosefina Andia Dekrita<sup>2</sup>, Yoseph Darius Purnama Ranga<sup>3</sup>  
lalebuuangelina@gmail.com<sup>1\*</sup>, andiadekrita1234@gmail.com<sup>2</sup>, jo.darius1206@gmail.com<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Nusa Nipa

Received: 23 12 2023. Revised: 10 01 2024. Accepted: 22 01 2024.

**Abstract :** This study aims to explain the implementation of People's Business Credit (KUR) at the KSP of the Obor Mas Cooperative Market Level Branch. The research method used is descriptive qualitative research. Data collection techniques are carried out by triangulation (combined observation, interviews, documentation). The subjects in this study included employees at KSP Kopdit Obor Mas Pasar Level Branch. The results showed that the Implementation of People's Business Lending (KUR) at the KSP Kopdit Obor Mas Pasar Level Branch has implemented the provision of KUR. In the implementation of the provision of people's business loans, the KSP Kopdit Obor Mas implements the provision of KUR in accordance with the provisions of KUR services regulated in the Regulation of the Minister of Cooperatives for Economic Affairs of the Republic of Indonesia No. 1 of 2023 concerning amendments to the regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia No. 1 of 2022 concerning guidelines for the implementation of people's business loans.

**Keywords :** People's business credit, Savings and loan cooperatives, Loans.

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada KSP Koperasi Obor Mas Cabang Pasar Tingkat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi). Subjek dalam penelitian ini antara lain pegawai pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat sudah menerapkan pemberian KUR. Dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat KSP Kopdit Obor Mas menerapkan pemberian KUR sesuai dengan ketentuan pelayanan KUR di atur dalam Permenkop Bidang Perekonomian RI No. 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat.

**Kata Kunci :** Kredit usaha rakyat, Koperasi simpan pinjam, Pinjaman.

### PENDAHULUAN

Koperasi adalah suatu badan hukum yang anggotanya berusaha untuk menciptakan nilai tambah yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Selain itu, koperasi merupakan gerakan ekonomi kerakyatan yang mengedepankan partisipasi masyarakat dan berupaya memperkuat struktur perekonomian nasional dengan demokrasi ekonomi berdasarkan prinsip kekeluargaan. Jenis koperasi ada bermacam-macam berdasarkan kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi para anggotanya, seperti koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produksi, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, (2012) koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari kumpulan orang-orang bukan kumpulan modal, artinya aktivitas koperasi harus benar-benar mengutamakan kesejahteraan anggota. Dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah salah satu badan usaha yang berbadan hukum dengan usaha yang beranggotakan perorangan yang berorientasi menghasilkan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan anggotanya.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah Indonesia yang memberikan bantuan kredit dan suku bunga rendah kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendukung pengembangan usaha debitur (Mitan et al., 2021). Program ini membantu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan membantu masyarakat yang kekurangan uang untuk mengembangkan bisnis. Dalam perkembangannya sejak tahun 2007 hingga Desember 2014, KUR telah membayar Rp.1,78,85 triliun kepada total 12,4 juta debitur. Pada tahun 2014, jumlah KUR yang disalurkan kepada 2,4 juta debitur sebesar Rp . 40,2 triliun. Pada tahun 2015 jumlah KUR yang disalurkan kepada 22,75 juta debitur sebesar Rp.30 triliun. Pada tahun 2016 jumlah KUR yang disalurkan 94 juta debitur sebesar Rp.100 triliun. Pada tahun 2017 jumlah KUR yang disalurkan kepada 96,7 juta debitur sebesar Rp.110 triliun. Pada tahun 2018 jumlah KUR yang disalurkan 120,3 juta debitur sebesar Rp.120 triliun. Pada tahun 2019 jumlah KUR yang disalurkan 140,1 juta debitur sebesar Rp. 140 triliun. Pada tahun 2020 jumlah KUR yang disalurkan 198,53 juta debitur sebesar Rp. 190 triliun. Kebijakan/program KUR yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dimana pada tahun 2020 tidak bisa dipungkiri pandemi covid-19 telah memberikan dampak

langsung ke banyak usaha UMKM, namun juga berdampak pada banyaknya UMKM yang tidak dapat bertahan atau gulung tikar (Goo et al., 2023).

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Koperasi Obor Mas merupakan koperasi yang ditetapkan sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk mendapatkan akad cukup baik. Koperasi Obor Mas telah mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyalur KUR dan telah bekerja sama dengan yaitu PT.Jaminan Kredit Indonesia (Jamkarindo) Selain itu Koperasi Obor Mas mendapatkan posisi ke-dua sebagai penerima jatah penyaluran KUR Mikro menunjukkan akses yang cukup mudah bagi anggota untuk mengajukan pembiayaan KUR Mikro. Sebagai salah satu koperasi penyalur KUR, tentu Koperasi Obor Mas memiliki perbedaan dengan Bank-bank penyalur KUR lainnya yang berbasis bunga, baik dalam sistem akad, hukum yang digunakan, maupun syarat pengolahan dana, dan lain-lain.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Koperasi Obor Mas sebagai lembaga keuangan penyalur pembiayaan KUR. Begitupun disegi koperasi itu sendiri juga lebih memilah UMKM mana yang pantas untuk disalurkan modal agar pengembalian pembiayaan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Sehingga kredit yang diberikan oleh pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat ini, diharapkan sesuai dengan kemampuan pengusaha kecil dalam hal penggunaan kredit secara selektif guna mencapai tujuan yang diharapkan serta tidak membebani pengusaha kecil. Pelaksanaan dari Kredit Usaha Rakyat ini diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha kecil dalam mendapatkan tambahan modal usaha yang mereka butuhkan dengan kredit yang terjangkau dan prosedur yang sederhana. Dengan tambahan modal yang didapatkan oleh pengusaha kecil diharapkan dapat meningkatkan serta mengembangkan usaha yang dimilikinya.

KSP Koperasi Obor Mas telah menyusun standar operasional prosedur (SOP) pelayanan KUR mikro yang meliputi: (1) prosedur pengajuan kredit, (2) prosedur analisa kredit, (3) prosedur kredit, tata cara pembayaran, dan (4) riwayat kredit program. Modal (kredit) memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan usaha kecil. Misalnya, program KUR memberikan pengusaha kecil akses terhadap kredit yang dapat digunakan sebagai modal awal untuk meluncurkan usaha produktif baru. Selain itu, modal atau kredit ini akan mendorong masyarakat untuk lebih bersemangat dalam menjalankan berbagai jenis usaha dengan kreativitas dan inisiatif mereka sendiri, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan kata lain, modal atau kredit ini dapat dimanfaatkan oleh pengusaha

kecil untuk memperluas dan mengembangkan usahanya, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan yang diperoleh para pengusaha kecil.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis saat melakukan magang di KSP Kopdit Obor Mas terkhususnya pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat, penulis menemukan permasalahan yakni terjadi kurangnya berkas-berkas administrasi dalam proses pinjaman, banyak temuan yang membuat anggota merasa sulit dalam proses peminjaman KUR. kurangnya *Member Service Pinjaman* yang mengakibatkan terjadi penundaan proses pencarian KUR, penunggakan pengembalian pinjaman. Anggota peminjam tidak seluruhnya dapat mengembalikan pinjaman, baik untuk angsuran pokok maupun bunga pinjaman sesuai dengan ketentuan dan tepat pada waktu yang diperjanjikan. Selalu ada sebagian anggota yang dengan berbagai macam alasan tidak dapat mengembalikan pinjaman sehingga terjadinya penunggakan.

Prosedur pemberian kredit adalah aspek yang sangat vital dan perlu selalu diperhatikan serta dimonitor secara cermat untuk membantu mengurangi masalah penunggakan yang seringkali muncul (Patty et al., 2023). Kekurangan dalam melakukan analisis kredit dan kurangnya informasi yang diterima oleh koperasi dapat menjadi pemicu penundaan pembayaran oleh anggota peminjam. Selain itu, keputusan dan pencairan kredit yang tidak akurat juga dapat mengakibatkan anggota tidak dapat memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan keperluan yang diinginkan. Adanya berbagai faktor penyebab tunggakan kredit, seperti yang telah diuraikan, menuntut koperasi untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan prosedur pemberian kredit agar lebih efektif.

Menurut Muhammad dan Hamaya, (2019) menyatakan bahwa prosedur peminjaman KUR Calon debitur kredit usaha rakyat diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat, maka syarat- syarat yang ditetapkan pun sangat sederhana. Syarat-syarat yang perlu disertakan adalah bukti identitas diri berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto kopi Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Usaha. Mulyana et al., (2023) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan KUR pada UMKM adanya kemampuan baik potensi maupun pengetahuan/ketrampilan, serta dukungan motivasi dalam berbagai aspek, kedua hal tersebut tentunya akan berdampak langsung terhadap peningkatan usaha baik peningkatan kapasitas produksi, target maupun realisasi dapat tercapai. Berkaitan dengan implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, peningkatan kinerja usaha (UMKM) harus ditopang oleh kemampuan secara finansial maupun

permodalan. hal tersebut selalu diupayakan melalui peran pemerintah kepada pemilik usaha (UMKM) dalam memperoleh bantuan berupa kredit maupun pinjaman-pinjaman dana dengan harapan usaha yang dilakukan dapat tumbuh dan berkembang.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Sugiyono, (2019), Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah metode penelitian digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi) data yang diperoleh cenderung data kualitatif analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif dapat bersifat temuan potensi dan masalah keunikan objek makna suatu peristiwa proses dan interaksi sosial kepastian kebenaran data kontruksi fenomena temuan hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* atau *enterpretif*. Penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah serta menggunakan kenyataan yang sebenarnya bisa disebut penelitian naturalistik. Pada penelitian kualitatif teknik pengumpulan data secara triangulasi gabungan antara observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data pada penelitian kualitatif menggunakan analisis data bersifat induktif. Menurut Sugiyono, (2019), subjek penelitian adalah pihak yang berkaitan dengan yang diteliti (informan atau narasumber) untuk mendapatkan informasi terkait data penelitian yang merupakan sampel dari sebuah penelitian. Subjek dalam penelitian ini antara lain pegawai pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan ketentuan umum pelayanan kredit usaha rakyat diatur dalam permenko bidang perekonomian RI No.1 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Sesuai dengan ketentuan tersebut KSP Kopdit Obor Mas menerapkan tiga jenis pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu: 1) KUR Super Mikro, 2) KUR Mikro, dan 3) KUR Kecil. Dalam memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR), proses ini di KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat harus dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan umum pelayanan kredit usaha rakyat yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia No.1 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan. Pernyataan ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Ibu Roneni Sisilia S.Ak., selaku manager KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat.

Sesuai dengan ketentuan Seorang warga negara Indonesia diizinkan untuk mengajukan pinjaman KUR hingga Rp.500.000.000, walaupun sudah memiliki pinjaman sebesar Rp.25.000.000 dari Koperasi Obor Mas cabang pasar tingkat. Jika ingin mengajukan pinjaman tambahan, anggota dapat mengajukannya di Bank dengan nominal melebihi jumlah yang sudah dipinjam di KSP Kopdit Obor Mas. Terdapat tiga jenis KUR dengan ketentuan berbeda, yaitu KUR Super Mikro dengan besaran pinjaman antara Rp.1.000.000 s/d Rp.10.000.000, KUR Mikro dengan besaran pinjaman antara Rp.11.000.000., s/d Rp.100.000.000., dan KUR Kecil dengan plafon pinjaman antara Rp.100.000.000., s/d Rp.500.000.000. KSP Kopdit Obor Mas telah menjalankan penyaluran pinjaman dengan mematuhi ketentuan umum layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023. Hasil wawancara dengan Manager Ibu Roneni Sisilia S.Ak.

Adapun tahap-tahap dalam proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat adalah sebagai berikut. 1) Wawancara Awal, 2) Penjelasan Proses Kredit, 3) Pengisian Formulir Permohonan KUR, 4) Registrasi Pinjaman, 5) Registrasi Idep-slik, dan 6) Cek Limid. Dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), langkah-langkah yang telah disebutkan di atas menjadi bagian penting dari keseluruhan proses. Tahap-tahap tersebut menjadi bagian dalam proses memastikan bahwa anggota memiliki pemahaman yang baik terhadap prosedur-prosedur yang harus diikuti dan dapat memenuhi semua syarat yang diperlukan agar pengajuan kredit dapat berjalan lancar. Pernyataan ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Ibu Veronica Mengga ST. selaku member service pinjaman KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat.

Anggota datang ke kantor untuk konsultasi seputar Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan petugas layanan pinjaman menjelaskan langkah-langkah pemberian KUR di KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat. Setelah anggota menyetujui, petugas layanan pinjaman mengisi formulir permohonan KUR. Proses selanjutnya melibatkan beberapa tahapan, seperti registrasi kredit, registrasi Idep-slik untuk memastikan tidak ada pinjaman di lembaga lain, dan cek limit pada SIKOPDIT untuk menentukan kelayakan anggota menerima KUR. Setelah itu, dilakukan rapat panitia kredit dengan anggota yang terdiri dari pengurus, general

manager, manager, staf pemasaran, dan petugas layanan pinjaman. Jika permohonan disetujui, petugas layanan pinjaman mencetak formulir permohonan pinjaman dan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi. Setelah menyelesaikan pengecekan, petugas layanan pinjaman menghubungi anggota untuk memberitahu apakah anggota layak atau tidak menerima KUR. Hasil wawancara dengan Member Service Pinjaman Ibu Veronica Mengga ST.

Menurut Wati et al., (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia menyatakan bahwa akibat hukum perjanjian kredit dalam hal debitur meninggal dunia ada dua kemungkinan yaitu kredit jatuh ke ahli waris sebagaimana diatur dalam pasal 833 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) atau jaminannya dieksekusi pihak bank, serta kemungkinan kedua adalah kredit hapus karena adanya klausula asuransi jiwa atau perjanjian asuransi jiwa dengan syarat *banker's clause*, artinya disini pihak asuransi harus bertanggung jawab melunasi sisa utang debitur yang meninggal sesuai syarat dan ketentuan dalam polis.

Dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), terdapat perbedaan dalam prosedur pemberian KUR di setiap lembaga penyalur KUR. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dijelaskan oleh Ibu Roneni Sisilia S. Ak, selaku manajer KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat. Berdasarkan informasi yang ada, terdapat perbedaan pendekatan antara lembaga keuangan lain seperti bank dan koperasi dalam memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di bank, pemberian KUR dilakukan secara penuh sesuai dengan jumlah yang diajukan tanpa ada potongan administrasi atau persyaratan simpanan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memotivasi pelanggan sebagai nasabah. Di sisi lain, koperasi menganggap pelanggan sebagai anggota yang memiliki peran sebagai pemilik. Dalam koperasi, anggota yang mengajukan pinjaman KUR diwajibkan memiliki simpanan seperti simpanan wajib, simpanan khusus, dan simpanan non saham. Pentingnya simpanan tersebut dikaitkan dengan kewajiban-kewajiban anggota, seperti penyelesaian tunggakan pinjaman sebelumnya, Santunan Rawat Inap (SRI), Santunan Solidaritas Duka (SSD), serta hak dan kewajiban lainnya yang harus dipenuhi sebagai anggota.

Perbedaan konsep antara bank dan koperasi juga tercermin dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), di mana anggota koperasi memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan. Selain itu, dalam keberlanjutan anggota, koperasi memberikan berbagai bentuk dukungan seperti Santunan Rawat Inap (SRI) ketika anggota sakit dan Santunan Solidaritas Duka (SSD) saat anggota meninggal. Dalam hal penyelesaian pinjaman,

koperasi memiliki mekanisme seperti pengembalian Simpanan Saham kepada ahli waris pada akhir tahun, pembayaran Dividen atau Sisa Hasil Usaha (SHU), serta kewajiban pembayaran pinjaman akan dilunaskan pada saat pembayaran klaim asuransi pada DAPERMA bersamaan dengan dikembalikan saham anggota meninggal tersebut kepada ahli waris ketika anggota meninggal. Perbedaan lainnya adalah bahwa di bank, tidak ada Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan pembayaran pinjaman dilanjutkan oleh ahli waris jika nasabah meninggal,

Menurut Mudassir et al., (2020) Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada koperasi bisa menghadapi beberapa kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi program tersebut. Beberapa kendala umumnya melibatkan aspek administratif, keuangan, dan regulasi. Berikut adalah beberapa kendala potensial yang mungkin dihadapi dalam penyaluran KUR pada koperasi: 1) Ketidaksesuaian Kriteria Peminjam, 2) Proses Administrasi yang Rumit, 3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia, 4) Pengelolaan Risiko, 5) Pemahaman Anggota Tentang KUR, 6) Keterbatasan Modal dan Likuiditas, 7) Ketidakpastian Regulasi, dan 7) Masalah Teknis dan Infrastruktur. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, penting bagi koperasi untuk memiliki strategi yang baik dalam manajemen risiko, meningkatkan pemahaman anggota, memperbaiki proses administrasi, dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, kerja sama dengan lembaga keuangan, pelatihan anggota, dan pendekatan partisipatif dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam penyaluran KUR pada koperasi.

Pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat tentunya menghadapi beberapa kendala dalam penyaluran KUR. Berikut ini berdasarkan pengamatan dan wawancara mengenai ketentuan pemberian KUR pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat. Pernyataan ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Arnoldus Lareda S.pd selaku staf pemasaran KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat. Kendala yang dihadapi mencakup hasil survei yang tidak sesuai dengan plafon pinjaman yang diminta, pemeriksaan limit yang mengungkap adanya pinjaman yang macet di lembaga Keuangan lain oleh anggota, ketidaksesuaian jaminan pinjaman, dan perhitungan sisa terima yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan, serta kurangnya member service pinjaman dalam pelayanan pinjaman anggota. Akibatnya, anggota yang bersangkutan memutuskan untuk membatalkan pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Implementasi Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat sudah menerapkan pemberian KUR. Dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat KSP Kopdit Obor Mas menerapkan pemberian KUR sesuai dengan

ketentuan pelayanan KUR di atur dalam Permenkop Bidang Perekonomian RI No. 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat. Dimana berdasarkan peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022, Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup yang mana dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan seperti lembaga *linkage*, dan koperasi.

Berdasarkan teori *Agency Theory* atau teori keagenan adalah hubungan keagenan atau suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*Principal*) memerintah orang lain (*agen*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama principal serta memberi kewenangan kepada *agen* untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal. *Principal* adalah Pihak yang memberikan kewenangan pada agen untuk melakukan pengawasan tindakan agen. Jika *principal* dan *agen* memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh principal (Lewar et al., 2023). Dalam penelitian ini, yang dikatakan Agen adalah lembaga keuangan dalam hal ini adalah KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat (Poling et al., 2023). Dalam peningkatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) koperasi KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat berperan untuk meningkatkan akses penyaluran pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam penyaluran atau implementasi KUR koperasi juga dituntut untuk mampu mematuhi prosedur serta ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah guna mencapai tujuan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat, dapat dikatakan bahwa implemementasi pemberian kredit usaha rakyat kepada peminjam KUR melibatkan serangkaian langkah dan proses yang dirancang untuk memastikan bahwa pinjaman disalurkan dengan efektif kepada pelaku usaha kecil dan mikro. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Ibu Roneni Sisilia (Manager) mengatakan Sebelum melakukan pemberian pinjaman, ada beberapa persyaratan atau prosedur yang harus di lakukan dan dipenuhi oleh anggota untuk mendapatkan pinjaman KUR

yaitu untuk memenuhi persyaratan pinjaman dimana peminjam sudah menjadi anggota koperasi Obor Mas Cabang Pasar Tingkat, melampirkan Foto copy KTP suami istri 1 lembar, melampirkan Foto copy KK 1 lembar, melampirkan Surat keterangan Usaha yang sudah berjalan 6 bulan, melampirkan Surat Izin usaha dari Desa atau Lurah, melampirkan hasil idep sliik OJK suami istri, melampirkan foto usah, bila anggota mengajukan pinjaman KUR Super Mikro dan KUR Mikro, bagi calon peminjam mengajukan KUR Kecil wajib ikut serta dalam program

Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang di bidang penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dengan jangka waktu pembayaran iuran sesuai dengan jangka waktu KUR yang bersangkutan dan dibuktikan dengan fotocopy bukti pembayaraan iuran BPJS ketenagakerjaaaan, telah mengikuti diklat pendidikan dasar sehari atau diklat *Financial Literacy* yang dibuktikan dengan foto copy sertefikat pendidikan dasar sehari atau foto copy setefikat Financial Sehari peminjam bila anggota mengajukan pinjaman dengan nominal yang besar ada kesepakatan antara peminjam dengan koperasi dimana ada jaminan berupa, Alat-alat rumah tangga/ elektronik, BPKB (dilengkapi dengan foto kendaraan), Sertifikat tanah. Muhammad dan Hamaya, (2019), dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus Bank BRI Merdeka Cabang Ternate)” menjelaskan bahwa Pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisis kredit (tahap pemeriksaan), tahap pemberian putusan, serta tahap pencairan kredit/akad kredit.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat sebelum melakukan pemberian pinjaman, ada beberapa persyaratan atau prosedur yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh anggota untuk mendapatkan pinjaman KUR pada KSP Kopdit Obor Mas yaitu persyaratan atau jaminan sebagai bukti pengambilan kredit di koperasi seperti sudah menjadi anggota di KSP Kopdit Obor Mas, *foto copy* KTP suami dan istri 1 lembar, foto copy KK 1 lembar, surat keterangan usaha yang sudah berjalan enam bulan dari desa atau lurah. Jaminan pinjaman berupa alat-alat rumah tangga atau barang elektronik, BPKB (dilengkapai foto kendaraan), sertifikat tanah. pemberian pinjaman KUR pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat untuk modal usaha melakukan beberapa

tahapan pengecekan terhadap anggota yang mengajukan pinjaman, antara lain melengkapi persyaratan kredit, tahapan awal yang dilakukan oleh anggota peminjam yang akan mengajukan permohonan kredit untuk modal usaha adalah melengkapi seluruh persyaratan pinjaman yang telah ditentukan oleh KSP Kopdit Obor Mas. Implementasi Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat sudah menerapkan pemberian KUR.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Goo, E. E. K., Herdi, H., & Rusmawati, L. (2023). Analysis of Implementation of SAK ETAP in Presentation of Financial Reports KSP KOPDIT Tuke Jung Head Office. *International Journal of Economics, Management, Business and Social Science (IJEMBIS) Peer-Reviewed – International Journal*, 3(2), 129–139. <https://cvodis.com/ijembis/index.php/ijembis/arti%0Dcle/view/120>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2002). *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat.
- Lewar, M. V. N., Tokan, M. G. M., & Rangga, Y. D. P. (2023). Kinerja Keuangan pada Kantor Pusat KSP Kopdit Pintu Air Rotat Ditinjau dari ROI, ROA dan ROE. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(4), 1342–1351. <https://doi.org/DOI 10.47065/ekuitas.v4i4.3436>
- Mitan, W., Dilliana, S. M., & Meyer, R. T. (2021). Pengaruh Fraud Diamond Terhadap Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan pada Koperasi Kredit Sube Huter. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(5), 212–217. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.5521568>
- Mudassir, A., Saleh, Dj., & Nasrulhaq. (2020). Efektivitas Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Tanah Lemo Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 1(2), 381–393. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3683/2995>
- Muhammad, A., & Hamaya, B. (2019). Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus Bank BRI Merdeka Cabang Ternate). *De Jure; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1(1), 30–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.33387/dejure.v1i1.1416>
- Mulyana, Y., Rosid, A., & Nurhayati. (2023). Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Pada Umkm Di Kabupaten Bandung. *Business Preneur: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2(2), 102–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/bp.v2i2.3504>

- Patty, T. F. Q., Aurelia, P. N., & Diliiana, S. M. (2023). Application of Good Corporate Governance Principles to the Quality of Financial Statements. *Neo Journal of Economy and Social Humanities*, 2(2), 89–99.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.56403/nejesh.v2i2.105>
- Poling, M. Y., Herdi, H., & Lamawitak, P. L. (2023). Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM Pada KSP Kopdit Ikamala. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(2).
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tentang Perkoperasian Indonesia*. (1992).
- Wati, N. P. P., Mahendrawati, N. L. M., & Arini, D. G. D. (2021). Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 196–201.  
<https://doi.org/https://10.22225/jkh.2.1.2996.196-201>